

KATALOG
ISSN 2776-8724

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BONDOWOSO
2025



Volume 10, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONDOWOSO

KATALOG
ISSN 2776-8724

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BONDOWOSO 2025

Volume 10, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONDOWOSO**

**Indikator Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Bondowoso
2025**

ISSN	: 2776-8724
No. Publikasi	:
Katalog	:
Ukuran Buku	: A4 (21,0 cm x 29,7 cm)
Jumlah Halaman	: xi+57 halaman
Naskah	: Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Penyunting	: Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Desain Kover	: Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik canva.com
Ilustrasi Kover	: canva.com
Diterbitkan Oleh	: ©BPS Kabupaten Bondowoso

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso

TIM PENYUSUN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BONDOWOSO 2025

Pengarah

Mudji Setijo, S.ST, M.Si.

Penanggung Jawab

Mudji Setijo, S.ST, M.Si.

Penyunting

Citra Kusumaningtyas S.Si

Penulis dan Pengolah Data

Xafrillah Agnes Nala Ayulia Wasa Hardiana, S.Tr.Stat.

Desain Layout

Xafrillah Agnes Nala Ayulia Wasa Hardiana, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2025” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dinas/instansi di Kabupaten Bondowoso. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, PDRB dan Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam publikasi ini, disampaikan terima kasih. Saran perbaikan selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang.

Bondowoso, Desember 2025

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bondowoso**



Mudji Setijo, SST, M.Si.
NIP. 19770713 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Umum.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sumber Data	5
1.5. Sistematika Penyajian	5
BAB II KEPENDUDUKAN	9
2.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	10
2.2. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	11
2.3. Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	12
2.4. Fertilitas	13
2.5. Penggunaan Alat Kontrasepsi	15
BAB III KESEHATAN	21
3.1. Sarana Kesehatan	21
3.2. Angka Harapan Hidup (AHH)	22
3.3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan	24
3.4. Penolong Kelahiran.....	25
3.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)	27
3.6. Imunisasi Balita.....	28
BAB IV PENDIDIKAN	33
4.1. Fasilitas Pendidikan	34
4.2. Partisipasi Sekolah	35
4.3. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	36
4.4. Angka Melek Huruf (AMH).....	37
4.5. Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah	38
4.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	39

BAB V PERUMAHAN	43
5.1. Status Kepemilikan dan Keterangan Bangunan Tempat Tinggal.....	43
5.2. Keterangan Sumber Air Minum	45
5.3. Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak.....	45
BAB VI KETENAGAKERJAAN	49
6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	49
6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	50
6.3. Pendidikan Tertinggi Penduduk Bekerja	51
BAB VII LAINNYA	55
7.1. Pengeluaran Penduduk.....	55

<https://bondowosokab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2025 (Ribu Jiwa).....	10
Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bondowoso per Kilometer Persegi, 2021–2025	12
Tabel 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur Produktif dan Angka Beban Ketergantungan, 2021–2025	13
Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso, 2024.....	14
Tabel 2.5 Persentase Penduduk Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kabupaten Bondowoso, 2024	15
Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2024	17
Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bondowoso, 2024	22
Tabel 3.2 Presentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Persentase Gangguan Sakit, dan Persentase Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Lalu, 2024	24
Tabel 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15 – 49 Tahun dan Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Bondowoso, 2024	26
Tabel 4.1 Rasio Murid Kelas dan Rasio Murid Guru Tahun Ajaran 2023/2024 hingga 2024/2025.....	34
Tabel 4.2 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bondowoso, 2024	38
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso, 2020-2024	40
Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Atap, Dinding, dan Lantai Terluas, 2024	44
Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Air Minum, 2024	45
Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Bahan Bakar Utama Memasak, 2024.....	46
Tabel 7.1 Rata–rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2024	56
Tabel 7.2 Rata–rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2024	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bondowoso 2020–2024 (tahun)	23
Grafik 3. 2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15–49 Tahun dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Sebelum 2 Tahun yang Lalu di Kabupaten Bondowoso Tahun 2023	26
Grafik 3. 3 Persentase Anak Usia 0–23 Bulan Pernah Diberi ASI di Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Lama Pemberian ASI, 2023.....	28
Grafik 3. 4 Persentase Balita di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Pemberian Imunisasi Lengkap Tahun 2023	29
Grafik 4. 1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Pendidikan Tahun 2023.....	36
Grafik 4. 2 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bondowoso 2023	37
Grafik 4. 3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2020–2024	39
Grafik 5. 1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Rumah Yang Ditempati, 2023	Error! Bookmark not defined.
Grafik 6. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) di Kabupaten Bondowoso, 2024.....	50
Grafik 6. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupate Bondowoso 2024	51
Grafik 6. 3 Proporsi Penduduk Bekerja (persen) Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Bondowoso 2024	52
Grafik 7. 1 Persentase Rata–rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2023 .	55

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Umum

Berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian hal tersebut harus dilaksanakan perbaikan dan peningkatan berbagai program baik itu dibidang sosial, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Upaya tersebut tentunya harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar pembangunan di tahap berikutnya dapat berhasil dan lebih terarah. Namun hal tersebut tentunya tidak akan dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa didukung data yang benar dan baik guna mengevaluasi hasil–hasil pembangunan Indonesia kedepan.

Program pembangunan di Indonesia terutama di bidang sosial yang dilakukan pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan penduduk. Dalam hal ini, sasaran dari program pembangunan adalah penduduk atau kelompok–kelompok penduduk sebagai subjek sekaligus objeknya. Melihat dari tujuan program, maka sasaran program dapat dibedakan atas perorangan, misalnya untuk meningkatkan status gizi balita, tingkat pendidikan (bersifat individu) dan untuk keluarga misalnya adalah program peningkatan pendapatan keluarga.

Keberhasilan suatu program dengan sendirinya tergantung dari sasaran program, yaitu perorangan dan keluarga, untuk memilih apakah akan berpartisipasi dalam suatu program pembangunan. Faktor luar yang juga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan perorangan dan keluarga dalam menanggapi program pembangunan yang ditujukan pada mereka adalah faktor masyarakat (berupa keadaan lingkungan, prasarana fisik, tingkat perekonomian komunitas, dan faktor budaya setempat), faktor kegiatan sektor swasta, dan faktor–faktor sosial ekonomi dan demografi dari perorangan dan keluarga.

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Bondowoso 2025 ini merupakan kumpulan berbagai macam data statistik yang dipilih untuk memberikan gambaran tentang perkembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso sebagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini.

Tidak semua indikator kesejahteraan rakyat dapat digambarkan disini, mengingat begitu kompleksnya dimensi sosial masyarakat dan tidak semua data yang tersedia dapat dikuantitatifkan. Untuk itu penyajian Inkesra Kabupaten Bondowoso ini akan mencakup data yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pembangunan (*output indikator*), dan dilengkapi dengan berbagai data lainnya yang tercakup dalam indikator input (*input indikator*) dan indikator proses (*process indikator*).

1.2. Maksud dan Tujuan

Berbagai data–data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan Inkesra disini menjadi komponen yang sangat penting sebagai tolok ukur untuk melihat dan menyusun rencana pembangunan kedepannya. Dalam tugasnya melaksanakan kegiatan statistik di berbagai bidang, Badan Pusat Statistik bertanggung jawab atas tersedianya data secara berkesinambungan guna melengkapi tujuan tersebut. Peran data disini sangatlah penting, karena dengan data hasil–hasil pembangunan dapat dilihat dan dievaluasi. Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Bondowoso ditinjau dari 6 aspek baik dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan serta indikator lainnya.

Tujuan yang ingin dicapai disini adalah memberikan gambaran dan bahan masukan serta evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan untuk tahun–tahun selanjutnya. Kebutuhan data kesejahteraan rakyat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil–hasil pembangunan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesempatan kerja.

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Inkesra Kabupaten Bondowoso tahun 2025 ini meliputi kondisi kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso. Kesejahteraan rakyat disini mengandung makna yang cukup luas, karena sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti PDRB per kapita belum memadai untuk memberikan gambaran tentang kesejahteraan yang dimaksud. Dalam pengertian yang sangat luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara rinci. Indikator yang disajikan

dalam publikasi ini hanya mencakup aspek–aspek kesejahteraan yang dapat terukur (*measurable welfare*) saja. Oleh karena itu statistik tentang sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat.

1.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2025 ini adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, Berita Resmi Statistik IPM, Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2024, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024, dan publikasi Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2025.

1.5. Sistematika Penyajian

Publikasi ini ingin mencoba menyajikan informasi dalam bentuk ulasan singkat untuk memberikan suatu gambaran tentang keadaan dan perkembangan kesejahteraan rakyat sehingga bisa lebih mudah dipahami. Penyajiannya dibagi dalam enam kelompok indikator, yaitu: kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, serta indikator lainnya.

BAB II

KEPENDUDUKAN



BAB II

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dalam program pembangunan. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun disisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman–pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Pembangunan manusia dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Penitikberatan pada kualitas SDM diperlukan karena penduduk yang besar hanya akan dapat menjadi aset pembangunan jika “kualitasnya” (dilihat dari derajat kesehatan dan atau tingkat pendidikan) cukup baik. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya merupakan beban pembangunan jika berkualitas rendah apabila dilihat dari komposisinya secara sosial dan budaya yang sangat beragam.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait

masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Ketersediaan data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas lagi data kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2025 (Ribu Jiwa)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0–4	29,12	27,93	57,05	104,26
5–9	27,15	26,27	53,42	103,35
10–14	25,58	25,02	50,60	102,24
15–19	26,93	25,60	52,53	105,20
20–24	29,05	28,42	57,47	102,22
25–29	29,42	28,68	58,10	102,58
30–34	28,38	29,41	57,79	96,50
35–39	28,11	28,72	56,83	97,88
40–44	27,12	27,78	54,90	97,62
45–49	27,78	29,26	57,04	94,94
50–54	26,45	26,93	53,38	98,22
55–59	25,07	26,13	51,20	95,94
60–64	21,13	21,28	42,42	99,30
65–69	17,32	18,86	36,18	91,83
70–74	12,01	13,89	25,90	86,47
75+	12,03	19,49	31,52	61,72

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020–2035 Hasil SP2020

Pada tahun 2020, BPS melakukan Sensus Penduduk di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bondowoso. Sensus Penduduk 2020 merupakan kegiatan 10 tahunan yang diadakan sejak tahun 1961. Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus penduduk ke–7.

Tabel 2.1 menyajikan karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2025 dari hasil proyeksi penduduk 2020–2035 sebesar 796,30 ribu jiwa yang terdiri dari 392,64 ribu laki–laki dan 403,66 ribu perempuan sehingga menghasilkan Rasio Jenis Kelamin sebesar 97,27 persen, yang berarti bahwa diantara 100 perempuan terdapat 97 laki–laki.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Bondowoso di dominasi oleh kaum Milenial. Kaum Milenial merupakan penduduk yang lahir pada tahun 1981–1996 atau sekarang berusia 29–44 tahun. Persentase kaum Milenial di Kabupaten Bondowoso sebesar 28,58 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa kelompok umur produktif mendominasi di Kabupaten Bondowoso, sehingga dapat memicu adanya bonus demografi.

Fenomena menarik terlihat dari rasio jenis kelamin per kelompok umur di Kabupaten Bondowoso, bahwa semakin meningkat usia rasio jenis kelamin cenderung menurun. Pada usia di bawah 29 tahun ke bawah masih diatas 100 persen, semakin meningkat usianya semakin mengecil rasio jenis kelaminnya hingga hanya sebesar 61,72 persen di kelompok umur 75 tahun ke atas.

2.2. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2020–2035 tercatat sebanyak 796,30 ribu jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan 3,99 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2024 yang mencapai 792,31 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 0,50 persen.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terlihat jelas antara penduduk di wilayah pedesaan dan perkotaan. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Dengan luas wilayah Kabupaten Bondowoso sekitar 1.560,10 kilometer persegi yang didiami oleh 796,30 jiwa maka rata–rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso adalah sebanyak 510 jiwa perkilometer persegi. Semakin tahun, kecenderungan kepadatan

penduduk di Kabupaten Bondowoso semakin meningkat. Hal ini dikarenakan meningkatnya penduduk disetiap tahunnya dengan luas wilayah tetap.

Kecamatan terpadat di Kabupaten Bondowoso adalah Kecamatan Bondowoso. Pada tahun 2025 kepadatan penduduknya sebesar 3.317 penduduk per kilometer persegi. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bondowoso merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, sehingga banyak penduduk yang memilih tinggal dan menetap di sini. Selain itu, terdapat Kecamatan Ijen dengan kepadatan penduduk yang paling rendah, dimana kepadatan penduduknya pada saat tahun 2025 sebesar 58 penduduk per kilometer persegi. Hal ini dikarenakan Kecamatan Ijen merupakan kecamatan yang berada di dataran tinggi, dimana sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, sehingga akses penduduk untuk tinggal cukup sulit.

Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bondowoso per Kilometer Persegi, 2021–2025

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Kepadatan Per Kilometer Persegi (Jiwa)
(1)	(2)	(3)
2021	779,45	499,61
2022	783,87	502,45
2023	788,16	505,20
2024	792,29	507,85
2025	796,30	510,42

Sumber: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 2020–2035 Hasil SP2020

2.3. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan Angka Beban Ketergantungan atau *Dependency Ratio* yaitu perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (umur 15–64 tahun) . Besarnya Angka Beban Ketergantungan ini menunjukkan beban ketergantungan ekonomi penduduk usia produktif. Semakin mengecil angka beban ketergantungan, akan semakin baik kondisi perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Dari Tabel 2.3 nampak bahwa 68,02 persen penduduk Kabupaten Bondowoso merupakan penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif

(0–14 tahun) sebesar 20,23 persen dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 11,75 persen.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Kelompok Umur Produktif dan Angka Beban Ketergantungan, 2021–2025

Tahun	Struktur Umur			Jumlah	Angka Beban Ketergantungan
	0–14	15–64	65 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2021	20,21	69,20	10,60	100,00	44,51
2022	20,19	68,94	10,87	100,00	45,05
2023	20,19	68,65	11,16	100,00	45,68
2024	20,21	68,33	11,46	100,00	46,35
2025	20,23	68,02	11,75	100,00	47,02

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Bondowoso Hasil Sensus Penduduk 2020

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Bondowoso tahun 2025 sebesar 46,35 persen. Dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun) harus menanggung sebanyak 47 orang penduduk yang tidak produktif, yang mana 20,23 persen diantaranya berasal dari kelompok muda (usia di bawah 15 tahun) dan 11,75 persen lainnya berasal dari kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun). Angka Ketergantungan Kabupaten Bondowoso cenderung meningkat di tahun 2024. Kondisi ini disebabkan karena penduduk usia 0–14 dan 65+ meningkat sementara usia 15–64 menurun. Salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka mengurangi besarnya angka beban ketergantungan adalah dengan menekan angka kelahiran (*fertilitas*) dan menghindari usia perkawinan muda.

2.4. Fertilitas

Kelahiran (*fertilitas*) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*mobilitas*). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah–tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban pemerintah semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan.

Penduduk menurut status perkawinan penting untuk diketahui karena terkait dengan tingkat fertilitas suatu daerah. Semakin besar penduduk yang berstatus kawin memungkinkan tingkat fertilitas yang tinggi di suatu daerah tersebut.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso, 2024

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	25,37	16,89	21,00
Kawin	69,23	64,87	66,98
Cerai *)	5,40	18,24	12,02
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2024
Keterangan : *) termasuk cerai hidup dan cerai mati

Dari hasil Susenas 2024, Penduduk Kabupaten Bondowoso usia 10 tahun keatas berstatus kawin sebesar 66,98 persen, yang berstatus belum kawin sebesar 21,00 persen, sedangkan untuk yang berstatus cerai (termasuk cerai hidup dan cerai mati) sebesar 12,02 persen. Berdasarkan jenis kelamin baik penduduk laki-laki maupun perempuan usia 10 tahun ke atas mayoritas berstatus kawin.

Dalam setiap penelitian tentang kependudukan khususnya tentang pertumbuhan penduduk, peneliti biasanya langsung memusatkan kepada obyek penelitian yaitu penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas. Karakteristik yang akan dilihat antara lain, status perkawinan, usia perkawinan pertama, jumlah anak yang dilahirkan dan penggunaan alat kontrasepsi. Dengan mengetahui informasi tersebut tentunya akan lebih mudah untuk merencanakan program pembangunan, khususnya di bidang kependudukan.

Usia perkawinan pertama bagi perempuan berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda (rendah usia perkawinan pertama) akan semakin besar resiko yang dihadapi selama kehamilan maupun saat melahirkan, baik bagi ibu maupun anak. Umur perkawinan pertama seseorang juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menambah penduduk di suatu daerah, semakin muda seseorang kawin maka semakin panjang masa reproduksinya sehingga akan memberikan peluang yang sangat besar terhadap jumlah anak yang akan dilahirkan.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk Perempuan Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Di Kabupaten Bondowoso, 2024

Umur Perkawinan Pertama (tahun)	2024
(1)	(2)
< 17	44,37
17–18	24,80
19–20	15,29
21 +	15,54

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Beberapa hasil penelitian/kajian menemukan adanya pengaruh perkawinan penduduk usia dini sebagai penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Selain itu, usia perkawinan penduduk terutama perempuan yang belum cukup umur merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, serta tingginya angka perceraian terutama di pedesaan. Cukup beralasan apabila masalah perkawinan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk pada umumnya. Sebaliknya, baik buruknya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk baik secara ekonomi ataupun sosial merupakan faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya peristiwa atau kasus perceraian di kalangan penduduk.

Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang pernah kawin (10 tahun ke atas) di Kabupaten Bondowoso ternyata sebanyak 44,37 persen masih di bawah usia 17 tahun ketika melakukan perkawinan pertamanya. Padahal pada usia tersebut seharusnya masih menempuh pendidikan setingkat SMA.

Berikutnya, sebesar 24,80 persen perempuan yang pernah kawin melakukan perkawinan pada usia 17–18 tahun dan hanya sebesar 15,29 persen yang melaksanakan perkawinan pertamanya pada usia 19–20 tahun. Perempuan yang pernah kawin melakukan perkawinan pada usia 21+ tahun di Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 15,54 persen.

2.5. Penggunaan Alat Kontrasepsi

Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

dengan cara pengendalian angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana (KB), disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Lahirnya program keluarga berencana antara lain bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran. Program seperti ini masih sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak bermakna, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk. Usia antara 15–49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan karena pada selang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar. Perempuan yang usianya berada pada periode ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Program KB dilakukan dengan alat kontrasepsi yang jenisnya berbagai macam. Pemerintah selalu berharap cakupan akseptor KB terus mengalami peningkatan, terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor

keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 2.6 Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2024

Alat Kontrasepsi/Cara KB	2024
(1)	(2)
MOW/Tubektomi/Sterilisasi Wanita	3,75
AKDR/IUD/Spiral	2,91
Suntikan	62,35
Susuk KB/Norplan/Implan/ Alwalit	9,01
Pil KB	21,24
Kondom	0,36
Cara Tradisional (Pantang Berkala/Kalender)	0,38

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2024, persentase wanita berumur 15–49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB lebih dari separuhnya atau sekitar 62,35 persen memilih menggunakan suntikan. Kemudian sebesar 21,24 persen berikutnya lebih berminat dan memilih pil KB. Hanya sebesar 0,38 persen yang memilih cara tradisional, yaitu pantang berkala/kalender.

BAB III

KESEHATAN



Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

3.1. Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bondowoso ternyata cukup memadai untuk jumlah penduduk yang harus dilayani. Hal ini

dapat dilihat dari jumlah puskesmas, rumah sakit, dan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan data yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang tertuang dalam publikasi Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2025 di Kabupaten Bondowoso tercatat sebanyak 4 unit rumah sakit umum, 25 unit puskesmas, dan 17 unit klinik/balai kesehatan. Tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bondowoso untuk tahun 2024 sebanyak 53 dokter, 31 dokter gigi, 173 perawat, 318 tenaga kebidanan, dan 81 tenaga kefarmasian.

Tabel 3.1 Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bondowoso, 2024

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Prasarana Kesehatan	
Rumah Sakit Umum	4
Puskesmas	25
Klinik/Balai Kesehatan	17
Posyandu	1.101
Poskesdes	150
Ponkeskel	9
Tenaga Kesehatan	
Dokter	53
Dokter Gigi	31
Perawat	173
Tenaga Kefarmasian	81
Tenaga Kebidanan	318

Sumber : Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2025

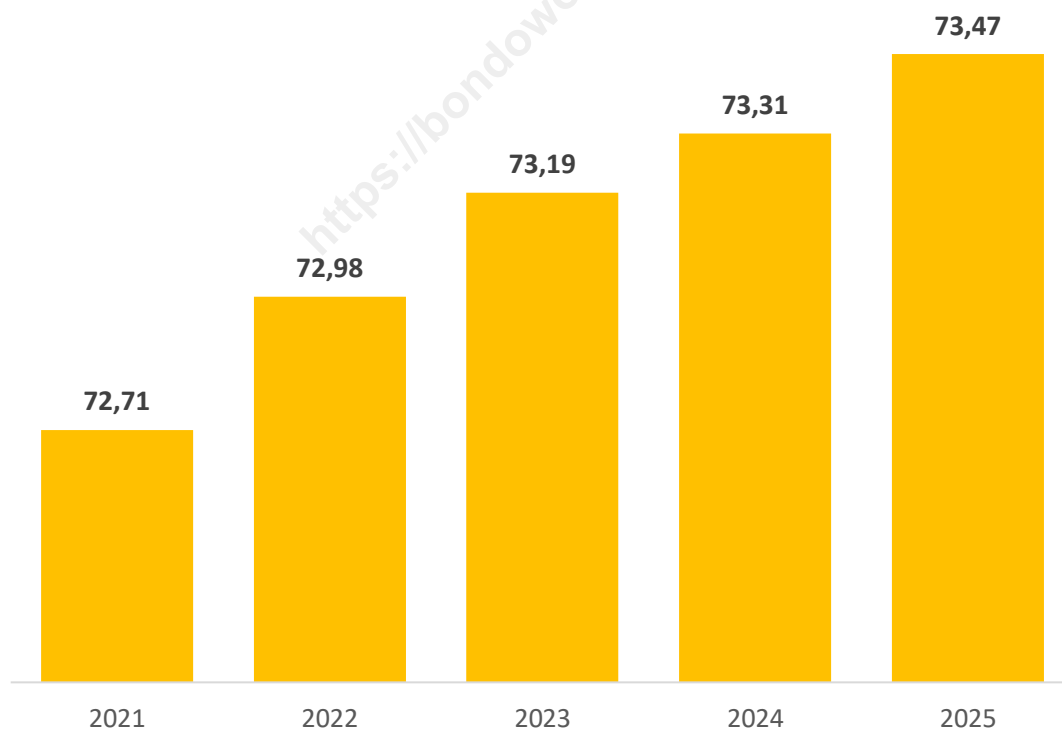
3.2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas dan daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori serta memiliki pendidikan yang lebih baik. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Hal tersebut akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun

tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, serta meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Berdasarkan Grafik 3.1 dapat dilihat bahwa umur harapan hidup di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2021 sampai 2025 terus mengalami peningkatan. Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2025 sebesar 73,47 tahun. Angka ini mengandung arti bahwa setiap bayi di Kabupaten Bondowoso yang lahir hidup pada tahun 2025 mempunyai harapan untuk hidup selama 73,47 tahun. Dengan adanya peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bondowoso, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.



Sumber : Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bondowoso 2025

Grafik 3.1 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bondowoso, 2021–2025 (tahun)

3.3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Penduduk yang sehat cenderung memiliki kualitas fisik yang baik. Dengan fisik yang baik segala aktivitas dalam kehidupan sehari–hari akan berjalan dengan lancar. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan status kesehatan penduduk adalah angka keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka keluhan kesehatan diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu, sedangkan angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari–hari.

Tabel 3.2 Presentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan, Persentase Gangguan Sakit, dan Persentase Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Lalu, 2024

Uraian	Persentase
(1)	(2)
Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir (%)	
Laki–Laki	
Ada Keluhan	33,13
Tidak Ada Keluhan	66,87
Perempuan	
Ada Keluhan	38,26
Tidak Ada Keluhan	61,74
Gangguan Sakit (Angka Kesakitan) (%)	
Laki–Laki	
Ada Gangguan Sakit	13,35
Tidak Ada Gangguan Sakit	86,65
Perempuan	
Ada Gangguan Sakit	15,94
Tidak Ada Gangguan Sakit	84,06
Jumlah Hari Rawat Inap dalam Setahun Yang Lalu (%)	
1–3	45,96
4–6	34,83
7–29	19,22

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Berdasarkan hasil susenas 2024, sekitar 33,13 persen penduduk laki-laki di Kabupaten Bondowoso dan 38,26 persen penduduk perempuan mempunyai keluhan kesehatan (referensi survei dalam sebulan yang lalu). Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis, dan lain sebagainya. Dari yang mempunyai keluhan kesehatan di atas, 13,35 persen (laki-laki) dan 15,94 persen (perempuan) mengaku mengalami gangguan sakit. Jumlah hari rawat inap dalam setahun yang lalu persentase terbesar sebanyak 1–3 hari (45,96 persen).

3.4. Penolong Kelahiran

Perkembangan anak pada masa balita akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang saat mereka tumbuh menjadi manusia dewasa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan balita dimulai dari kesehatan ibu, tenaga penolong pada saat lahir, pemberian ASI dan imunisasi. Keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan selalu berkaitan dengan penolong persalinan yang membantu proses kelahiran tersebut. Dalam proses kelahiran penolong terbaik kelahiran adalah tenaga medis (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain) atau orang yang sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan persalinan.

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan *neo natal*, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di setiap desa.

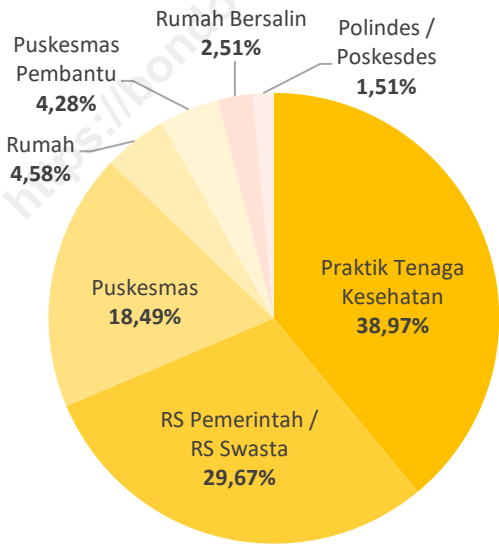
Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Keberadaan tenaga medis seperti dokter dan bidan yang ditunjang dengan sarana/peralatan yang memadai, akan sangat menolong pada saat proses kelahiran. Dokter dan bidan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam proses kelahiran terutama pada saat di mana kelahiran mempunyai resiko kematian yang tinggi terhadap ibu dan anak. Sehingga diharapkan tingkat kematian ibu dan anak pada saat proses kelahiran dapat terus menurun.

Berdasarkan Tabel 3.3 tercatat bahwa penolong kelahiran terakhir di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 didominasi oleh tenaga kesehatan yaitu bidan sebesar 61,59 persen dan dokter kandungan sebesar 32,25 persen. Dan hanya sebesar 1,60 persen perempuan yang pernah kawin usia 15 –49 tahun menggunakan Dokter Umum sebagai penolong kelahiran terakhir pada anak lahir hidup terakhir tahun 2024, sedangkan sisanya menggunakan penolong kelahiran perawat/dukun beranak/lainnya.

Tabel 3.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15 – 49 Tahun dan Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Bondowoso, 2024

Penolong Kelahiran Terakhir	2024
(1)	(2)
Dokter Kandungan	32,25
Dokter Umum	1,60
Bidan	61,59
Perawat	4,20
Dukun Beranak	0,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Grafik 3.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15–49 Tahun dan Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Sebelum 2 Tahun yang Lalu di Kabupaten Bondowoso, 2024

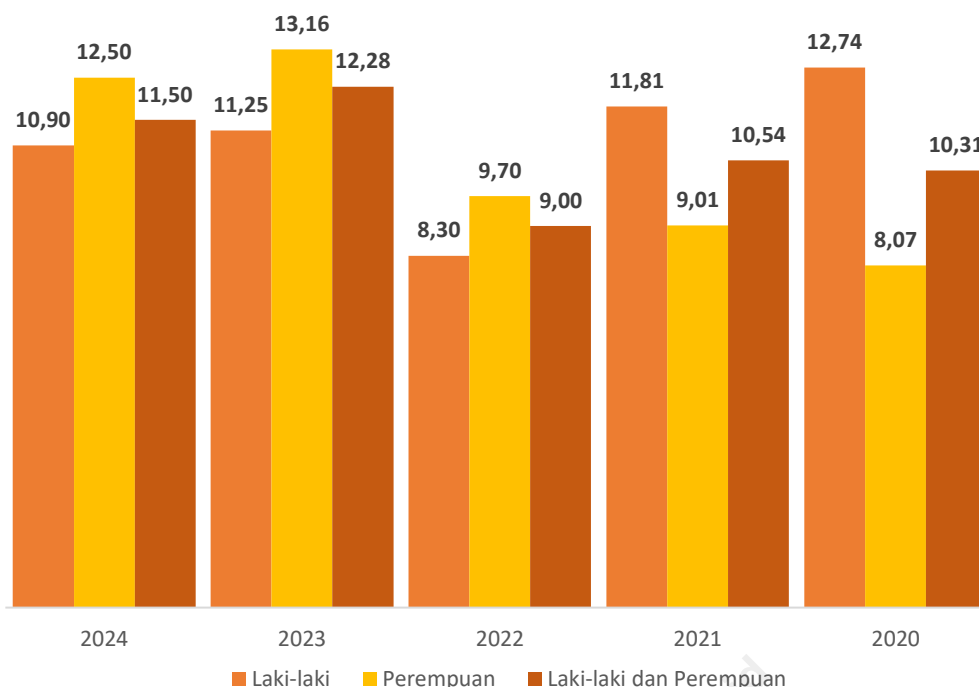
Berdasarkan Grafik 3.2 Hasil Susenas 2024 diperoleh gambaran sebanyak 39,97 persen perempuan yang pernah kawin usia 15–49 tahun melahirkan Praktik Tenaga

Kesehatan, khususnya pada kelahiran anak lahir hidup terakhir sebelum 2 tahun yang lalu. Sebanyak 29,67 persen melahirkan di RS Pemerintah/Swasta/RSIA; 18,49 persen melahirkan di Puskesmas; 4,58 persen melahirkan di Rumah; 4,28 persen melahirkan di Puskesmas Pembantu; 2,51 melahirkan di Rumah Bersalin; dan 1,51 persen melahirkan di Polindes/Poskesdes.

3.5. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, terutama pada bayi berumur 6 bulan ke bawah, selain juga bermanfaat bagi ibu. ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk seluruh gizi bayi pada enam bulan pertama kehidupannya. Selain itu bayi yang diberi ASI memiliki kekebalan lebih tinggi terhadap penyakit. Pada umur 6–12 bulan, ASI masih merupakan makanan utama bayi, karena mengandung lebih dari 60 persen kebutuhan gizi bayi. Pemberian ASI yang ideal adalah sampai anak berumur 24 bulan.

Berdasarkan Grafik 3.3 diketahui bahwa pada tahun 2024, rata-rata lama pemberian ASI pada bayi berumur 0–23 bulan di Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 11,50 bulan dengan rata-rata lama pemberian ASI pada bayi perempuan lebih lama dibanding bayi laki-laki dengan rincian masing-masing sebesar 12,50 dan 10,90. Pola ini sama dalam 3 tahun terakhir, sedangkan pada tahun 2021 dan 2020, rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi laki-laki lebih tinggi dibanding bayi perempuan.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Grafik 3.3 Persentase Penduduk Berumur 0–23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI di Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Rata–Rata Lama Pemberian ASI, 2024

Tingkat kesadaran akan pentingnya ASI bagi anak harus terus di sampaikan kepada masyarakat di tengah gencarnya promosi akan susu formula. Terutama pemberian informasi kepada ibu–ibu yang kegiatan utamanya bekerja, karena di tengah kesibukannya, ibu–ibu pekerja tersebut cenderung mempercayakan kebutuhan gizi anaknya dengan susu formula.

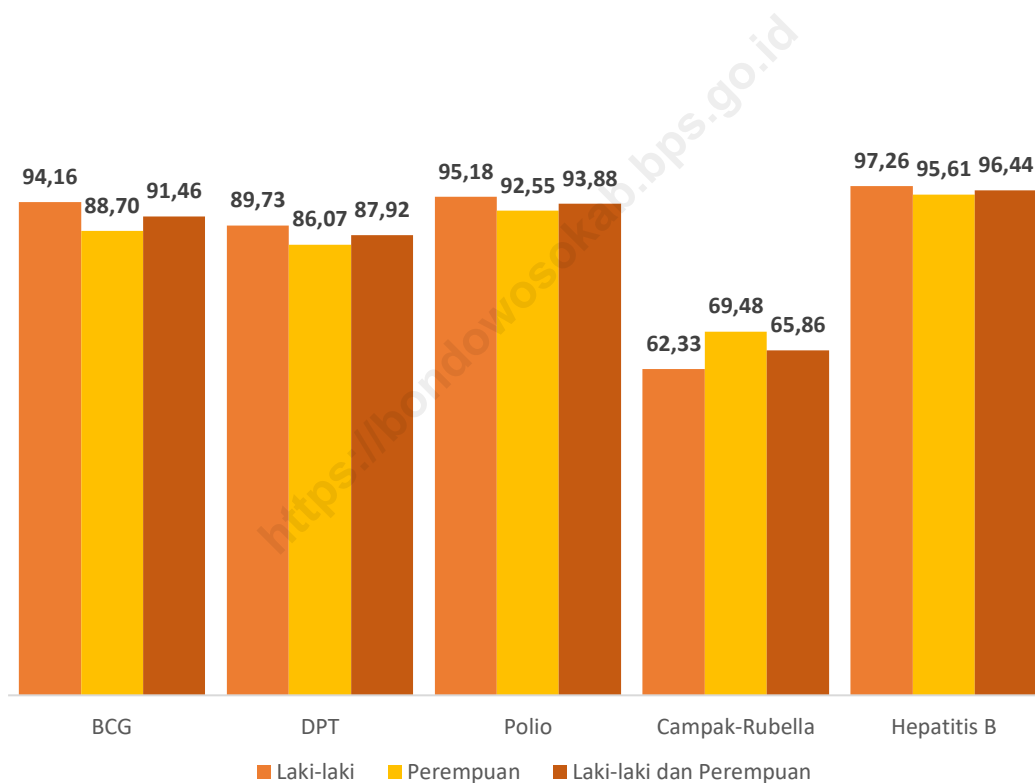
3.6. Imunisasi Balita

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak. Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut), dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Dengan imunisasi yang lengkap dan makanan yang bergizi diharapkan akan terbentuk generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas.

Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak–anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari

beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Berdasarkan grafik 3.4, persentase imunisasi pada bayi pada tahun 2024 berada di atas 50 persen. Pada tahun 2024, persentase imunisasi tertinggi adalah Hepatitis B dengan total (laki-laki dan perempuan) sebanyak 96,44 persen. Persentase imunisasi BCG, DPT, dan Polio berada di atas 80 persen, masing-masing 91,46 persen; 87,92 persen; dan 93,88 persen. Kemudian diikuti persentase Campak sebesar 65,86 persen.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Grafik 3.4 Persentase Penduduk berumur 0–59 Bulan (Balita) di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin dan Pemberian Imunisasi Lengkap, 2024

BAB IV

PENDIDIKAN



Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Bondowoso menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada

indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah.

4.1. Fasilitas Pendidikan

Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid guru dan rasio murid kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Tabel 4.1 Rasio Murid Kelas dan Rasio Murid Guru Tahun Ajaran 2023/2024 hingga 2024/2025

Uraian	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)
Tingkat SD sederajat		
Rasio murid sekolah	107,04	104,61
Rasio murid guru	10,44	10,74
Tingkat SMP sederajat		
Rasio murid sekolah	119,61	115,05
Rasio murid guru	9,64	9,03
Tingkat SMA sederajat		
Rasio murid sekolah	168,67	163,08
Rasio murid guru	11,07	10,51

Sumber: Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2025

Dikarenakan data jumlah kelas menurut jenjang pendidikan belum tersedia secara menyeluruh, maka data rasio murid kelas tidak dapat tersedia pula, tetapi data rasio murid sekolah dapat kami tampilkan. Menurut Tabel 4.1 rasio murid guru pada jenjang sekolah dasar

sederajat di Kabupaten Bondowoso tahun ajaran 2024/2025 adalah 1 berbanding 10,74. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap 1 orang guru SD sederajat mengajar rata-rata sebanyak 10 sampai 11 murid. Rasio murid guru untuk jenjang SMP sederajat di tahun ajaran yang sama sebesar 1 banding 9,03, sedangkan rasio untuk jenjang SMA sebesar 1 banding 11,51. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap 1 orang guru SMP sederajat mengajar rata-rata sebanyak 9 sampai 10 murid, sedangkan untuk SMA sederajat mengajar rata-rata sebanyak 11 sampai 12 murid. Untuk rasio murid sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula rasionya. Adapun rasio murid sekolah jenjang SD sederajat pada tahun ajaran 2024/2025 mencapai 1 berbanding 104,61. Artinya, pada setiap SD sederajat rata-rata terdapat 104–105 siswa. Pada jenjang SMP sederajat mencapai 1 berbanding 115,05. Artinya, pada setiap SMP sederajat rata-rata terdapat 115–116 siswa. Dan untuk jenjang SMA sederajat mencapai 1 banding 163,08. Artinya, pada setiap SMA sederajat rata-rata terdapat 163–164 siswa.

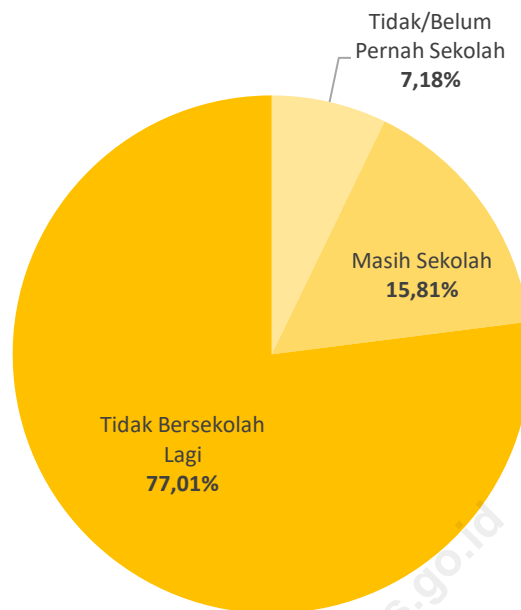
4.2. Partisipasi Sekolah

Dalam hal partisipasi sekolah, dapat dikatakan bahwa mereka yang mempunyai pendapatan tinggi memiliki kemungkinan/pejuang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang mempunyai pendapatan rendah, kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian dari sudut sosial ekonomi, tingkat pendidikan seseorang merefleksikan tingkat kesejahteraannya.

Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga masyarakat dan juga keluarga. Banyaknya penduduk yang mendapatkan pendidikan di sekolah merupakan indikator tersedianya tenaga terdidik atau sumber daya manusia terdidik yang tersedia saat ini. Besaran ini ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah penduduk yang berusia 5 tahun ke atas yang berasal dari hasil Susenas, diantaranya menyajikan persentase partisipasi bersekolah yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Grafik 4.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2024, persentase penduduk Kabupaten Bondowoso usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah sebesar 7,18 persen. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang masih bersekolah sebesar 15,81 persen di

tahun 2024. Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi sebesar 77,01 persen di tahun 2024.

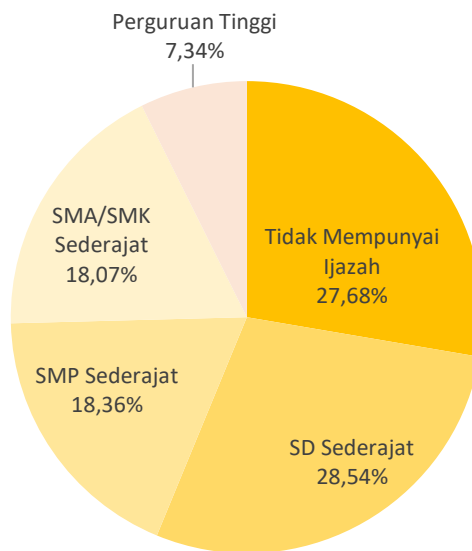


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Grafik 4.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Pendidikan, 2024

4.3 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bondowoso mayoritas memiliki ijazah SMP sederajat ke bawah. Persentase penduduk Kabupaten Bondowoso usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 27,68 persen dan hanya tamat Sekolah Dasar (SD) sederajat mencapai 28,54 persen. Untuk penduduk 15 tahun ke atas yang pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sederajat mencapai 18,36 persen. Dengan demikian, penduduk Kabupaten Bondowoso usia 15 tahun ke atas hanya tamatan SMP sederajat ke bawah sebanyak 74,58 persen. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat SMA/ sederajat hanya 18,36 persen, sedangkan tamat Perguruan Tinggi hanya sebesar 7,34 persen.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Grafik 4.2 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bondowoso, 2024

4.4. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Secara harfiah, angka melek huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Latin/Arab/Braile.

Angka Melek Huruf diperoleh dengan membagi banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan seluruh penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tinggi mutu sumber daya manusia suatu masyarakat. Persentase penduduk yang dapat baca tulis di Kabupaten Bondowoso tahun 2024 menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 adalah sebesar 88,19 persen huruf latin, 65,43 persen huruf arab, dan 11,18 persen huruf lainnya.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bondowoso, 2024

Dapat Baca Tulis Huruf	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	93,09	83,63	88,19
Huruf Arab	69,52	61,63	65,43
Huruf Lainnya	13,54	8,99	11,18

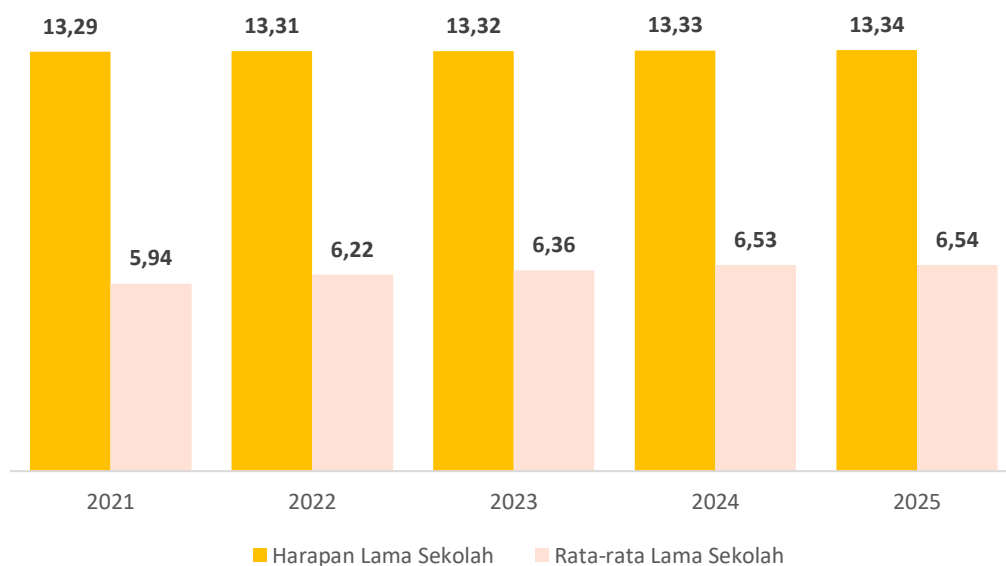
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kemampuan membaca/menulis huruf latin, arab, atau lainnya pada penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibanding perempuan. Penduduk laki-laki 15 tahun keatas yang dapat baca tulis huruf latin sebanyak 93,09 persen, sementara penduduk perempuan baru 83,63 persen, huruf arab sebanyak 69,52 dibanding 61,63, dan huruf lainnya 13,54 dibanding 8,99. Lebih rendahnya angka melek huruf penduduk perempuan kemungkinan disebabkan penduduk yang berusia lanjut, karena pada masa lalu pendidikan bagi kaum laki-laki lebih diutamakan dibanding perempuan.

4.5. Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan sebagai salah satu variabel ukuran dalam aspek pendidikan untuk penghitungan IPM, yaitu untuk menghitung Indeks Pendidikan, yang sebelumnya menggunakan variabel Angka Melek Huruf (AMH). AMH sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu BPS mengganti ukuran AMH dengan ukuran HLS untuk penghitungan Indeks Pendidikan.

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bondowoso sebesar 13,29 tahun kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 13,34 tahun pada tahun 2025. Ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.



Sumber : Berita Resmi Statistik IPM, 2025

Grafik 4.3 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bondowoso, 2021–2025

Terbatasnya anggaran pendidikan dari pemerintah seringkali menjadi dilema, target pencapaian rata–rata lama bersekolah penduduk harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua rumah tangga mampu menyekolahkan anak–anaknya hingga pendidikan tinggi, semakin mahal biaya sekolah menyebabkan sebagian orangtua terpaksa memutuskan kelangsungan sekolah anak–anaknya dan diarahkan membantu ekonomi keluarga.

Sejalan dengan angka harapan sekolah, rata–rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, meskipun baru pada taraf pendidikan SD. Berdasarkan grafik 4.3 rata–rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso tahun 2025 sebesar 6,54 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata rata penduduk Kabupaten Bondowoso usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan kelas 6 Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama/ sederajat kelas 1.

4.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya

serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Persentase penduduk Kabupaten Bondowoso berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah tahun 2024 adalah sebesar 15,81 persen. Angka ini merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Sejalan dengan itu, persentase penduduk yang tidak sekolah lagi sebesar 77,01 persen dan menjadi angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Artinya, dari persentase penduduk yang masih bersekolah sebelumnya, pada tahun 2024 banyak penduduk yang statusnya sudah tidak bersekolah lagi. Disamping itu, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah pada tahun 2024 adalah sebesar 7,18 persen.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso, 2020-2024

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
2024	7,18	15,81	77,01
2023	6,66	17,56	75,78
2022	6,43	19,38	74,19
2021	6,44	18,92	74,64
2020	6,60	21,18	72,22

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

BAB V

PERUMAHAN

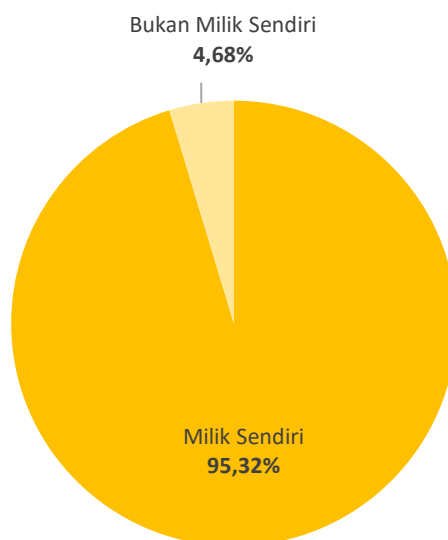


Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan akan perumahan relatif sulit pemecahannya karena berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kemampuan masyarakat yang terbatas dan pembiayaan pembangunan perumahan yang cukup besar.

Program pemerintah yang menyangkut bidang perumahan terus ditingkatkan, bukan hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi kualitas dan harga yang terjangkau. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang pesat menjadikan kebutuhan rumah semakin meningkat pula. Sementara luas wilayah daratan tak bisa bertambah, maka pembukaan lahan untuk kepentingan pemukiman harus tetap mempertimbangkan faktor keamanan bagi semua pihak. Lahan pertanian yang disulap menjadi daerah permukiman tentu akan berakibat berkurangnya produksi pangan yang bisa dihasilkan oleh lahan tersebut. Belum lagi lahan produktif yang diubah fungsinya menjadi industri atau infrastruktur akan menyita sumber daya air dalam tanah.

5.1. Status Kepemilikan dan Keterangan Bangunan Tempat Tinggal

Tempat tinggal di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024, sebagian besar berstatus milik sendiri atau sebesar 95,32 persen. Persentase rumah tangga dengan status rumah bukan milik sendiri (rumah dinas, kontrak/sewa, dan bebas sewa) sebesar 4,68 persen.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2024

Grafik 5.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Status Rumah Yang Ditempati, 2024

Tabel 5.1 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Atap, Dinding, dan Lantai Terluas, 2024

Keterangan Bangunan	Persentase
(1)	(2)
❖ Jenis Atap Terluas	
Asbes	3,93
Seng, Kayu/Sirap	0,57
Beton	0,46
Genteng	95,04
Bambu, Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia	0,00
❖ Jenis Dinding Terluas	
Tembok	76,31
Plesteran Anyaman Bambu/Kawat, Kayu/Papan, Batang Kayu	17,36
Anyaman Bambu, Bambu, Lainnya	6,33
❖ Jenis Lantai Terluas	
Marmer/Granit	1,74
Keramik	58,78
Parket/Vinil/Karpet, Ubin/Tegel/Teraso	1,38
Semen/Bata Merah	29,73
Bambu, Tanah, Lainnya	8,06
Kayu/Papan	0,32

Jenis atap terluas masih didominasi atap Genteng dengan persentase 95,04 persen diikuti atap berjenis lainnya. Sedangkan jenis dinding terluas masih didominasi oleh jenis dinding tembok sebesar 76,31 persen. Jenis lantai terluas didominasi dengan lantai keramik sebesar 58,78 persen.

5.2. Keterangan Sumber Air Minum

Sumber air minum yang paling banyak dipakai warga adalah menggunakan sumur bor/pompa sebesar 34,82 persen, serta mata air terlindung, air hujan sebesar 26,02 persen. Masih kurangnya pengguna sumber air minum ledeng baik meteran maupun eceran dan juga penggunaan sumur terlindung dapat menjadi pertimbangan pemerintah setempat untuk peningkatan layanan air bersih untuk warga setempat.

Tabel 5.2 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Sumber Air Minum, 2024

Sumber Air	Persentase
(1)	(2)
❖ Sumber Air Minum	
Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	2,79
Ledeng	13,54
Sumur Bor/Pompa	34,82
Sumur Terlindung	19,36
Sumur Tak Terlindung	1,66
Mata Air Terlindung, Air Hujan	26,02
Mata Air Tak Terlindung, Air Permukaan, Lainnya	1,80

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

5.3. Sumber Penerangan dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Sumber penerangan yang digunakan warga sebesar 100 persen adalah listrik PLN. Penggunaan elpiji, gas kota, biogas untuk bahan bakar memasak merupakan yang paling banyak yaitu sebesar 78,08 persen. Sementara itu, penggunaan kayu bakar sebesar 20,84 persen menempati urutan kedua dikarenakan masih terdapat banyak wilayah hutan di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 5.3 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Bahan Bakar Utama Memasak, 2024

Bahan Bakar	Persentase
(1)	(2)
Listrik	0,79
Elpiji, Gas Kota, Biogas	78,08
Minyak Tanah, Briket, Arang, Lainnya	0,23
Kayu Bakar	20,84
Tidak Memasak di Rumah	0,05

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2024

<https://bondowosokab.bps.go.id>

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

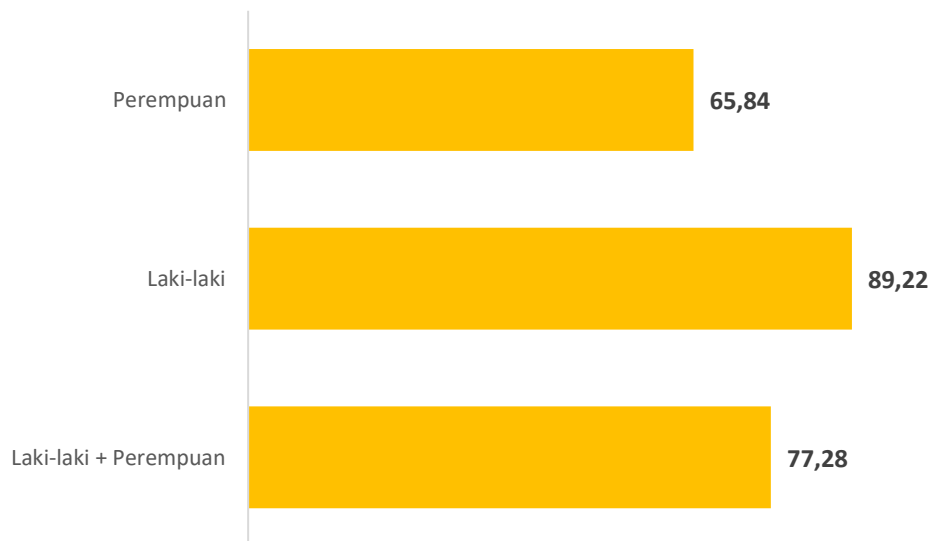


Ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan dan perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu, data dan informasi ketenagakerjaan sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk merancang berbagai kebijakan dan strategi pembangunan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Mengingat dinamika populasi yang terus berubah akibat mobilitas dan faktor demografis lainnya, data indikator ketenagakerjaan yang selalu diperbarui dan mencerminkan kondisi terkini sangat diperlukan agar perencanaan dan evaluasi program dapat dilakukan dengan tepat dan tidak mengalami bias informasi.

Ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan dan perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu, data dan informasi ketenagakerjaan sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk merancang berbagai kebijakan dan strategi pembangunan, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Mengingat dinamika populasi yang terus berubah akibat mobilitas dan faktor demografis lainnya, data ketenagakerjaan yang selalu diperbarui dan mencerminkan kondisi terkini sangat diperlukan agar perencanaan dan evaluasi program dapat dilakukan dengan tepat dan tidak mengalami bias informasi.

6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan Kerja terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan dalam kurun waktu seminggu terakhir. Sebaliknya, bukan Angkatan Kerja mencakup penduduk usia kerja yang sebagian besar waktunya untuk bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lain di luar kepentingan pribadi. Di sisi lain, “Bekerja” didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan durasi minimal 1 jam dalam seminggu yang lalu.



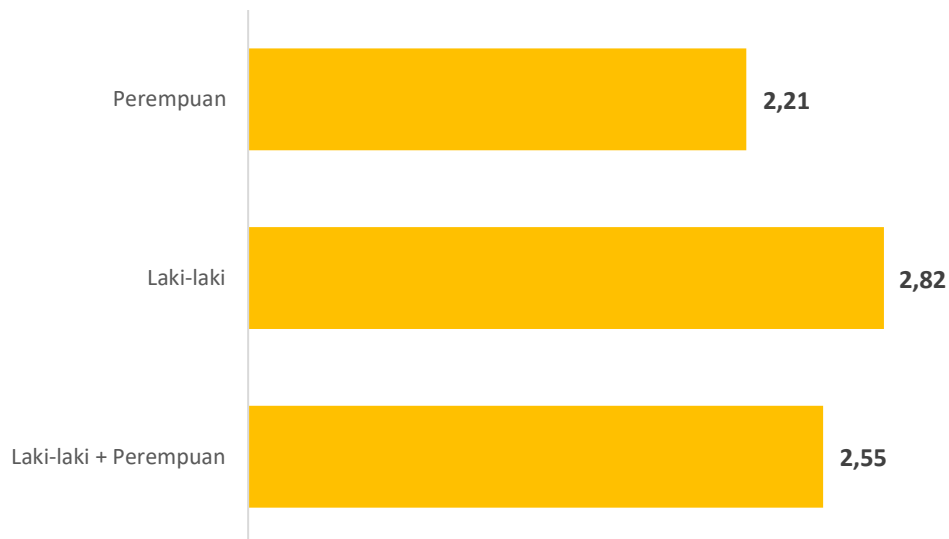
Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan 2025

Grafik 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) di Kabupaten Bondowoso, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat mencerminkan potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada Agustus 2025, TPAK di Kabupaten Bondowoso mencapai 77,28 persen. Ketimpangan TPAK antara laki-laki dan perempuan masih terlihat, di mana laki-laki TPAK laki-laki sebesar 89,22 persen dan TPAK perempuan sebesar 65,84 persen. Hal tersebut dapat disebabkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama tetap menjadi nilai yang dipegang masyarakat, termasuk di Kabupaten Bondowoso.

6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator utama lain yang dapat memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.



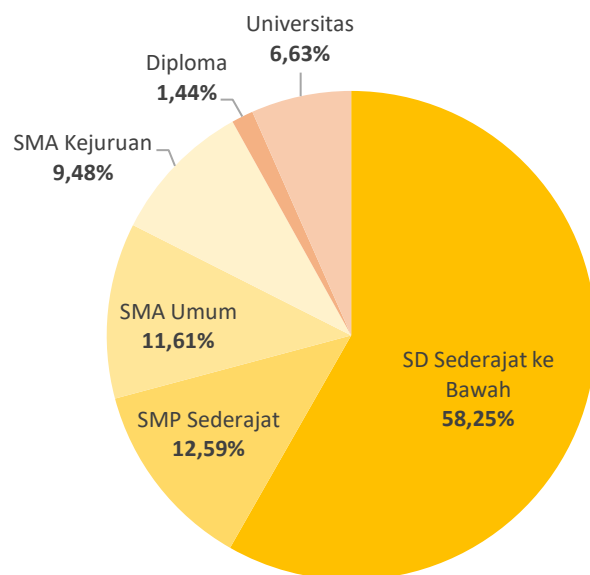
Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan 2025

Grafik 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Bondowoso, 2025

TPT Kabupaten Bondowoso pada Agustus 2025 sebesar 2,55 persen. Artinya, terdapat sekitar 252 tiap 10.000 angkatan kerja kabupaten Bondowoso yang sedang menganggur. Pola pengangguran di Kabupaten Bondowoso masih menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan. Pada Agustus 2025, TPT laki-laki tercatat sebesar 2,82 persen, sedangkan TPT perempuan 2,21 persen. Laki-laki umumnya masih diharapkan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sementara perempuan lebih sering mendapat peran dalam pengelolaan rumah tangga.

6.3. Pendidikan Tertinggi Penduduk Bekerja

Pada Agustus 2025, penduduk yang bekerja di Kabupaten Bondowoso masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 279-an ribu orang atau 58,25 persen dari total penduduk bekerja. Sementara itu, tenaga kerja dengan pendidikan tinggi, seperti Diploma dan Universitas, tercatat sebanyak 38-an ribu orang atau 8,07 persen.



Sumber: Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan 2024

Grafik 6.3 Proporsi Penduduk Bekerja (persen) Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Bondowoso, 2025

<https://bondowosokab.bps.go.id>

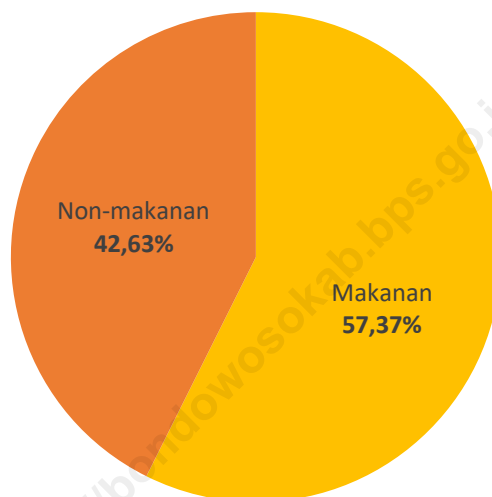
BAB VII

LAINNYA



7.1. Pengeluaran Penduduk

Tingkat penghasilan masyarakat di suatu wilayah dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Namun demikian sampai sejauh ini data mengenai pendapatan amat sulit didapat, terutama dalam hal keakuratan data. Oleh sebab itu untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat digunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga. Masyarakat Bondowoso rata-rata pengeluarannya terbesar pada makanan sebesar 57,37 persen, sedangkan pengeluaran bukan makanan sebesar 42,63 persen.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2024

Grafik 7.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2024

Untuk pengeluaran bahan makanan, padi-padian tetap menjadi primadona yang menduduki porsi yang terbesar yaitu 15,92 persen, sedangkan pengeluaran yang paling rendah adalah umbi-umbian hanya 0,55 persen. Masyarakat Bondowoso banyak yang lebih senang membeli makanan dan minuman jadi. Persentase pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi sebesar 29,87 persen. Tradisi makan sirih dan kebiasaan merokok tetap tinggi terlihat dari 14,68 persen dari pengeluaran bahan makanan.

Tabel 7.1 Rata-rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2024

Pengeluaran Makanan Per Kapita (Rupiah)	
Padi-Padian	99.592
Umbi-Umbian	3.439
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	32.318
Daging	28.281
Telur dan Susu	25.930
Sayur-Sayuran	45.204
Kacang-Kacangan	21.687
Buah-Buahan	31.434
Minyak dan Lemak	17.007
Bahan Minuman	18.860
Bumbu-Bumbuan	12.339
Bahan Makanan Lainnya	10.765
Makanan & Minuman Jadi	186.832
Rokok dan Tembakau	91.840
Total Pengeluaran Makanan	625.529

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2024

Untuk pengeluaran bukan makanan, perumahan dan fasilitas rumah tangga mendapat porsi yang cukup tinggi 44,64 persen dibandingkan yang lain. Pengeluaran aneka barang dan jasa berada di urutan kedua yakni sebesar 22,16 persen dari pengeluaran non makanan. Adapun pengeluaran yang paling rendah untuk pengeluaran non makanan adalah pengeluaran keperluan pesta, sebesar 6,81 persen.

Tabel 7.2 Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan di Kabupaten Bondowoso, 2024

Pengeluaran Non Makanan Per Kapita (Rupiah)	
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	207.473
Aneka Barang dan Jasa	102.999
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	31.919
Barang Tahan Lama	40.071
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	50.627
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	31.660
Total Pengeluaran Bukan Makanan	464.748

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso 2024

<https://bondowosokab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BONDOWOSO**

Jl. Santawi No. 114 Bondowos 68215

Telp (0332) 421775 E-mail: bps3511@bps.go.id

Homepage: <https://bondowosokab.bps.go.id>